# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Agustino, Leo. 2005. *Politik dan Otonomi Daerah*. Banten : Untirta Press

Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kencana. Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (edisi revisi). Bandung: Refika Aditama

Mangkunegara AA. Anwar Prabu. 2009. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rafika Aditama.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : UGM

Misdyanti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Prawirosentono. Suryadi. 2008. *Kebijakan kinerja karyawan*. Yogyakarta: BPEE.

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Saefullah. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: Fisip UNPAD.

Salusu, J, 2001. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit*, Pt. Grasindo, Yogyakarta.

Solihin, Dadang, dan Putut Marhayudi. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Jakarta: Ismee.

Soehartono, Irwan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Surianingrat. Bayu. 1992. *Mengenal ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta:Prenada Media.

Wardhana, Arya Wisnu.2004 *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi,

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Surabaya: CV Cutra Media.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Salemba Empat.

Wiryatmi, Endang Tri L. 1996. *Manajemen Pelayanan Umum*. Bandung: LAN.

**B. Dokumen-Dokumen**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 6 Tahun 1996 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Pedoman Umum Reduce, Reuse, Recycle (3R) Permukiman

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Peraturan Walikota Bandung Nomor : 101 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/Prt/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan

**C. Media Elektronik**

http://en.wikipedia.org/wiki/sampah. Diakses pada tanggal 20 Februari 2013 pukul 20.30 WIB

http://digilib-ampl.net/pengelolaansampah. Diakses pada tangal 20 Februari 2013 pukul 20.31 WIB

*http://* www.stialan.ac.id/publik/perpustakaan.php. Diakses pada tanggal 02 Maret 2013 pukul 12.30